

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Pembangunan

Istilah ekonomi pembangunan mengacu pada suatu pengertian tentang ilmu ekonomi yang diterapkan dalam analisis masalah dan kebijakan perekonomian negara-negara yang belum maju (*underdeveloped countries*) dan atau negara-negara sedang berkembang (*developing countries*). Dari sudut pandang ilmu ekonomi, pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk memperluas kemampuan dan kebebasan memilih (*increasing the ability and freedom to choice*). Tercapainya hal tersebut merupakan indikator bahwa manusia secara individu maupun kolektif dapat meningkatkan utilitas/kualitas hidupnya. Karenanya yang harus dibangun terutama adalah kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kelembagaan-kelembagaan ekonomi modern. Dengan dibangunnya hal-hal tersebut diatas, diharapkan kesejahteraan rakyat makin tinggi, terutama makin baik, efisien, dan adilnya alokasi sumber daya ekonomi.⁶

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya, ada atau tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ketahun, tetapi juga perlu dukur

⁶ Prathama Rahardja da Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Edisi Keempat (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018), hlm. 311-312

dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia, peningkatan dalam pendapatan serta kemakmuran masyarakat.⁷

Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan per kapita masyarakat yang mengalami peningkatan secara terus-menerus (dalam jangka panjang) dan disertai terjadinya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan adanya alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan atau pendidikan, dan teknik.⁸

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di wilayah tersebut.⁹

⁷ Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia: Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019). hlm. 58

⁸ Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia: Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019). hlm. 58

⁹ Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia: Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019). hlm. 58

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki arah yang sama yakni dalam perkembangan ekonomi. Akan tetapi, pembangunan ekonomi akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan perubahan-perubahan seperti perubahan struktur, corak kegiatan ekonomi, tingkat pertumbuhan penduduk serta perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Maka dapat diartikan bahwa pembangun ekonomi adalah proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan dalam peningkatan produk per kapita, pemerataan pembangunan, dan taraf hidup masyarakat serta adanya perbaikan sistem kelembagaan.

2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (Pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut¹⁰

Tujuan utama dalam setiap upaya pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antar pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengolah sumber daya yang ada serta harus mampu

¹⁰ Lioncin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-5* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta, 2015), hlm. 374

melihat setiap potensi setiap sumber daya yang di butuhkan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

3. Teori Pembangunan Daerah

Saat ini, tidak ada satu teori pun yang mampu untuk menjelaskan tentang pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Meskipun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu dalam memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakekatnya, inti dari pembahasan teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu metode analisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah yang di jelaskan dalam bukunya Lionclin, adalah sebagai berikut :¹¹

Pembangunan Daerah = f (Sumberdaya alam, tenaga kerja, investasi
 entrepreneurship, transportasi, komunikasi,
 komposisi industri, teknologi, luas daerah,
 pasar ekspor, situasi ekonomi internasional,
 kapasitas pemerintah, pengekuan
 pemerintah pusat dan bantuan-bantuan
 pembangunan)

¹¹ Lioncin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-5* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta, 2015), hlm. 376

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Badan Pusat Statistik adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas dinas, dan penerimaan lain-lain.¹² Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus selalu di pacu secara terus menerus pertumbuhannya. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain bersumber dari pajak dan retribusi daerah di harapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli

¹² https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=P&Istilah_page=7
(di akses tanggal 13 Januari 2020: jam 11:45)

Daerah merupakan sumber penerimaan yang memiliki peran yang cukup besar bagi pembangunan suatu daerah, maka dari itu meningkatnya penerimaan pendapatan Asli daerah akan memberikan kontribusi yang besar untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga semakin besar Penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan menambah APBD di sisi Pendapatan Daerah, dan akan berpengaruh terhadap kemandirian suatu daerah tersebut dengan semakin kecilnya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

2. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah di atur dalam Undang-Undang N0. 33 Tahun 2004, dimana pasal 6 dijelaskan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli daerah terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dimana sumber penerimaan ini bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Adapun sumber pendapatan asli daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berkeinginan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan keseimbangan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi daerah yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁴

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah yang dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pada Perusahaan Milik Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.¹⁵

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan

¹³ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuanagan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 157

¹⁴ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuanagan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 157

¹⁵ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuanagan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 158

bunga, keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber penerimaan PAD adalah pendapatan yang diterima suatu daerah dari potensi daerah yang ada yaitu berupa sumber-sumber ekonomi dalam wilayah daerah masing-masing, dimana hal ini sudah di atur berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang sudah diberlakukan.

Melihat unsur-unsur dari penerimaan pendapatan daerah merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dari kemandirian daerah yang terletak pada segi keuangan. Hal ini dapat menjadi cara untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi PAD akan memberikan fungsi yaitu terlaksananya pembangunan ekonomi daerah. Wujud dari pembangunan ekonomi daerah ini masuk dalam sektor-sektor pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum dan pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat menunjang berjalannya aktivitas perekonomian masyarakat dengan baik.

3. Pendapatan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Salah satu hal penting dalam menerapkan kebijakan pembangunan sesuai prinsip syariah adalah terletak pada instrumen-instrumen yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan perekonomian negara. Dalam sejarah,

¹⁶ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuanagan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 159

pemerintahan islam telah menggunakan beragam instrumen untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan. Sumber-sumber tersebut antara lain:¹⁷

1) Kharraj

Sumber pendapatan yang pertama kali di perkenalkan pada zaman Rasulullah SAW adalah Kharraj. Kharraj adalah pajak terhadap tanah, atau di indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem Kharraj adalah bahwa kharraj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (*land productivity*) bukan berdasarkan zoning. Yang menentukan jumlah besar pembayaran Kharraj adalah pemerintah. Secara spesifik , besarnya Kharraj berdasarkan tiga hal yaitu karakteristik tanah, /Tingkat Kesuburan Tanah, Jenis Tanaman (termasuk *marketability* dan *quantity*), dan jenis irigasi. Sistem Kharraj berlaku untuk semua masyarakat baik Muslim maupun non-Muslim.¹⁸

2) Zakat

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segilintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan kekayaannya pada orang miskin dan zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Islam menjadikan instrumen zakat untuk keseimbangan

¹⁷ Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 180

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi Ketiga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 257

pendapatan di masyarakat. Tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan lebih merata. Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Sebagaimana yang telah dijelaskan yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah ayat 43:¹⁹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

“Artinya: dan tegakkanlah shalat, keluarkanlah zakat dan shalatlah (berjamaah) bersama orang-orang yang rukuk” .

3) Khums

Khums merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan negara, dimana khums beratrti harta yang dipungut dari rampasan perang. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Anfal ayat 41:²⁰

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَلْجَمِ عَانَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Artinya: Ketahuilah, bahwa apa yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah da rasulnya dan untuk kerabat rasul, anak-anak yatim, oramg-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan kepada apa yang kami turunkan pada hamba-Ku (Muhammad) pada hari Furqan. Yitu hari berhadapannya pasukan islam lawan pasukan kafir. Dan allah maha kuasa atas segala sesuatu.”

¹⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 249

²⁰ Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Hakim*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 183

Berdasarkan pada penjelasan ayat di atas para Ulama Syi'i mengatakan bahwa pendapatannya apapun harus dikenakan Khums sebesar 20%, sedangkan ulama sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid menyatakan bahwa khums itu bukan saja dari hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.²¹

4) Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada warga non-muslim sebagai konsekuensi dari perlindungan terhadap jiwa dan harta mereka serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya dan kompensasi dari dibebaskan dari kewajiban ikut. Pada masa nabi Muhammad SAW. Jizyah di pungut dari laki-laki dewasa dan mampu secara fisik dan materil sebesar 1 dinar (10 Dirham) pertahun bagi orang-orang yang berpenghasilan kecil, 2 Dinar (20 Dirham) pertahun bagi orang yang berpenghasilan sedang, dan 4 Dinar (40 Dirham) bagi orang yang berpenghasilan tinggi. Sedangkan, anak-anak dan perempuan, pendeta, orang cacat dan miskin dibebaskan dari kewajiban membayar Jizyah.²² Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Firman Allah QS. At-Taubah Ayat 29:²³

²¹ Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 264

²² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 53

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Hakim*, (Jakarta: Gema Insani, 2016) hlm. 192

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ

“Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan tidak mengharamkan apa yang di haramkan oleh Allah dan Rasulullah. Dan tidak mengikuti agama yang benar (Agama Allah) dari golongan orang-orang yang diberikan Kitab, sehingga mereka membayar upeti sedang mereka rendah diri”.

5) ‘Ushr

‘Ushr merupakan pajak bea impor yang dibebankan kepada para pedagang. Pada masa Rasulullah, ‘Ushr dipungut dari pedagang ahli zimmi sebesar 5 % per tahun kepada pedagang muslim sebesar 2.5% per tahun. Pajak ‘Ushr ini hanya dikenakan terhadap para pedagang yang memiliki omzet sebesar 200 dirham.

6) Penerimaan Lainnya

Penerimaan lainnya yakni penerimaan yang diperoleh dari adanya Kaffarah yaitu berupa denda yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan sesuai syariat Islam. Penerimaan lainnya juga berasal dari harta warisan Kalalah atau yang dimaksud dengan orang yang tidak mempunyai ahli waris. Harta waris orang kalalah dimasukkan ke dalam kas negara, berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang yang tidak mempunyai ahli waris maka ahli warisnya adalah Nabi (negara).²⁴

²⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: , 2016), hlm. 54

B. Produk Domestik Regional Bruto

1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah domestik atau merupakan jumlah hasil seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah.²⁵ Sedangkan menurut definisi, Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tertentu dan pada umumnya terlihat dalam waktu satu tahun.²⁶

Meningkatnya angka PDRB berarti juga akan menaikkan tingkat perekonomian masyarakat sehingga produktivitas masyarakat sehingga akan naik dan menyebabkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah meningkat.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto adalah seluruh nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun pada suatu wilayah tertentu. PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, kenaikan Produk Domestik Regional Bruto akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut

²⁵ BPS, *Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha*, (Sumatera Selatan: BPS, 2015), hlm. 1

²⁶ R. Widodo Dwi Pramono , *Ekonomi Wilayah Untuk Perencanaan Tata Ruang*, (Jakarta: Deepublish, 2019), hlm. 42

akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di daerah tersebut.

2. Jenis Produk Domestik Regional Bruto

Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto dapat melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal yang disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.²⁷

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu pula sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi suatu

²⁷ Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*, (Palembang: BPS Kota Palembang, 2019), hlm. 4

wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

3. Produk Domestik Regional Bruto Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Produk Domestik Regional Bruto merupakan alat ukur dalam memantau pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah atau daerah. Pertumbuhan ekonomi pada saat ini menjadi sangat luas dimana tidak hanya menjelaskan tentang kegiatan produksi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi merupakan semua aktivitas dalam sektor produksi yang sangat berkaitan dengan adanya keadilan distribusi pendapatan.

Perbedaan antara ekonomi islam dan ekonomi konvensional adalah adanya unsur *falah* di dalam ekonomi islam. *Falah* ialah bentuk kesejahteraan yang hakiki, dimana *falah* dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang dunia dan akhirat, sehingga kesejahteraan tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih di tekankan pada aspek spritual. Pendapatan yang berdasarkan prinsip ekonomi islam bertujuan untuk untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga unsur *falah* merupakan bagian yang perlu diperhitungkan dalam mencapai kesejahteraan umat.

Pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif ekonomi islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi. Perspektif islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapasitas yang disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.²⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Nuh ayat 10-12:²⁹

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ
وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

"Artinya: maka aku berkata (kepada mereka), “Mohonlah ampunan kepada tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu.”

C. Jumlah Penduduk

1. Pengertian Penduduk

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.³⁰

²⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 125

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Hakim*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 571-572

³⁰ <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html> (diakses tanggal 13 Januari 2019: jam 12.03)

Kependudukan dalam bahasa Yunani yaitu *Demos* yang artinya rakyat atau penduduk yang merupakan hal penting di dalam pembangunan ekonomi yang merupakan penggerak dan pelaksanaan ekonomi disamping sebagai sumber tenaga kerja. Penduduk dalam suatu wilayah dapat dilihat dari aspek positif dan negatif. Aspek positif dimana penduduk yang besar akan mampu mendorong pembangunan di suatu wilayah itu sendiri, apabila diiringi dengan perluasan wilayah kesempatan kerja yang semakin besar. Oleh karena itu, jumlah penduduk di suatu wilayah mempunyai arti yang sangat penting terutama dengan membuat suatu perencanaan pembangunan, sehingga perencanaan yang dihasilkan lebih realistis.

2. Komponen Terbentuknya Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan proses keseimbangan dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk, komponen tersebut meliputi:³¹

a. Fertilitas

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Tinggi rendahnya tingkat fertilitas dapat menggambarkan kecepatan pertumbuhan penduduk suatu daerah atau negara.

³¹ Mulyadi S., *Ekonomi Sumber Daya Manusia: Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 19-31

b. Mortalitas

Mortalitas (Kematian) merupakan salah satu diantara tiga komponen demografi yang dapat memengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian penting, tidak saja bagi pemerintah melainkan juga pihak swasta terutama yang berkecimpungan dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Ukuran kematian menunjukkan suatu angka atau indeks yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya kematian suatu penduduk.

c. Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu daerah ke daerah lain yang melampaui batas-batas administrasi, politik/negara, yang sering juga diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang umumnya disebabkan oleh alasan ekonomi, seperti menyangkut lapangan dan jenis pekerjaan serta alasan lain seperti keamanan.

3. Teori Kependudukan

a. Aliran Malthusian

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam “Essay On Population”, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk

mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang.³²

Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan semakin banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian.

b. Aliran Marxist (Karl dan F. Angel)

Aliran ini tidak sependapat dengan Malthus (bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan). Menurut Marxist tekanan penduduk disuatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang di hasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk.³³

³² Edmund Conway, *50 Gagasan Ekonomi Yang Perlu Anda Ketahui*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group,2015), hlm. 15

³³ Edmund Conway, *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group,2015), hlm. 32

c. Aliran Neo-Malthusian (Garreth Hardin dan Paul Ehrlich)

Pada abad 20, teori Malthus mulai diperdebatkan kembali. Kelompok ini menyokong aliran Malthus, akan tetapi lebih radikal lagi dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara “*Preventif Check*” yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Tahun 1960-an dan 1970-an foto-foto telah diambil dari ruang angkasa dengan menunjukkan bumi terlihat seperti sebuah kapal yang berlayar dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang terbatas yang pada suatu saat kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan bahan makanan tersebut sehingga akhirnya malapetaka menimpa kapal tersebut.³⁴ Tahun 1871 Ehrlich menulis buku “*The Population Bomb*” dan kemudian di revisi menjadi “*The Population Explotion*” yang berisi:

- 1) Sudah Terlalu banyak manusia di bumi ini.
- 2) Keadaan bahan makanan sangat terbatas.
- 3) Lingkungan rusak sebab populasi manusia meningkat.

d. Teori Kependudukan Kontemporer

1) John Stuart Mill

Teori Kependudukan Kontemporer John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan

³⁴ Edmund Conway, *50 Gagasan Yang Perlu Anda Ketahui*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group,2015), hlm. 35

penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun demikian dia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat memengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya ia mengatakan apabila produktivitas seorang tinggi ia cenderung ingin memiliki keluarga kecil. Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah. Jadi taraf hidup (standard of living) merupakan determinan fertilitas. Tidaklah benar bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan (seperti dikatakan Malthus) atau kemiskinan itu disebabkan karena sistem kapitalis (seperti pendapat Marx) dengan mengatakan, kalau suatu waktu di suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan ini hanyalah bersifat sementara saja. Pemecahannya ada dua kemungkinan yaitu mengimpor bahan makanan, atau memindahkan sebagian penduduk wilayah tersebut ke wilayah lain. Memperhatikan bahwa tinggi rendahnya tingkat kelahiran ditentukan oleh manusia itu sendiri, maka Mill menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu. Dengan meningkatnya pendidikan penduduk maka secara rasional maka mereka mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada. Di samping itu Mill

berpendapat bahwa pentingnya distribusi kekayaan para konglomerat eropa..³⁵

2) **Arsene Dumont**

Arsene Dumont seorang ahli demografi bangsa Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1880 dia menulis sebuah artikel berjudul "Depopulation et Civilization". Ia melancarkan teori penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaritas sosial (theory of social capilarity). Kapilaritas sosial mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai posisi yang tinggi di masyarakat, misalnya seorang ayah selalu mengharapkan dan berusaha agar tidak bergantung pada ekonomi yang tinggi melebihi apa yang dia telah capai. Untuk dapat menempati yang tinggi dalam masyarakat, keluarga yang besar merupakan beban yang berat dan perintang. Konsep ini dibuat berdasarkan atas analogi bahwa cairan akan naik pada sebuah pipa kapiler. Teori kapilaritas sosial dapat berkembang dengan baik pada negara demokrasi, di mana tiap individu mempunyai kebebasan untuk mencapai posisi yang tinggi di masyarakat.³⁶

³⁵ Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, (Palembang: Penerbit Lindan Bestari, 2020), hlm. 22

³⁶ Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, (Palembang: Penerbit Lindan Bestari, 2020), hlm. 23

3) Emili Durkheim

Emile Durkheim adalah seorang ahli sosiologi Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Apabila Dumont menekankan perhatiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk maka Durkheim menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ia mengatakan akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk akan timbulnya persaingan di antara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Dalam memenangkan persaingan tiap-tiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan, dan mengambil spesialisasi tertentu. Keadaan seperti ini jelas terlihat pada kehidupan masyarakat perkotaan dengan kehidupan yang kompleks. Apabila dibandingkan antara kehidupan masyarakat tradisional dan masyarakat perkotaan, akan terlihat bahwa pada masyarakat tradisional tidak terjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan, tetapi pada masyarakat industri akan terjadi sebaliknya. Hal ini disebabkan adanya masyarakat industri tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang tinggi.³⁷

³⁷ Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, (Palembang: Penerbit LINDAN Bestari, 2020), hlm. 24

4) Miachel Thomas Sadler dan Doubleday

Kedua ahli ini adalah penganut teori fisiologis. Sadler mengemukakan bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah atau negara. Jika kepadatan penduduk tinggi, daya reproduksi manusia akan menurun sebaliknya jika kepadatan penduduk rendah daya reproduksi manusia akan meningkat. Sedangkan Doubleday berpendapat bahwa daya produksi produk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Jadi kenaikan kemakmuran menyebabkan turunnya daya reproduksi manusia. Jika suatu jenis makhluk hidup diancam bahaya, mereka akan mempertahankan diri dengan segala daya yang mereka miliki. Mereka akan mengimbangnya dengan daya reproduksi yang lebih besar. Menurut Doubleday, kekurangan bahan makanan merupakan perangsang bagi daya reproduksi manusia, sedangkan keebihan pangan justru merupakan faktor pengekan pertumbuhan penduduk.³⁸

³⁸Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, (Palembang: Penerbit Lindan Bestari, 2020), hlm. 25

5) Herman Khan

Kelompok ini muncul untuk menolak “pesimistis” dalam melihat perkembangan dunia. Teori ini dimotori dunia oleh Herman Khan (1976), ia berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi di negara berkembang akan dapat diatasi jika negara maju dapat membantu negara miskin, sehingga kekayaan dan kemampuan hidup akan miskin, didapatkan oleh orang miskin. Ia beranggapan bahwa teknologi maju akan mampu melakukan pemutaran ulang (recycling) terhadap nasib manusia pada suatu masa yang disebut “Era Substitusi”.

4. Penduduk Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Hakikat Penduduk (manusia) menurut pandangan islam adalah sebagai *Khalifah fi al-ardh*, yakni menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-Nya yang lain dimuka bumi. Kedudukan mulia ini tidak lain dalam rangka mengemban misi agung yakni memakmurkan bumi dengan penuh amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT.³⁹ Sedangkan dalam perspektif pendidikan, penduduk diartikan sebagai salah satu wujud investasi terhadap sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas dan pendidikan dapat memberikan peranan secara langsung terhadap pertumbuhan pendapatan dengan melalui optimalisasi dan maksimalisasi keterampilan dan produktivitas kerja dari

³⁹ Nurul Huda, *Ekonomi Pembnaguna Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 182

adanya penduduk. Sehingga dapat di katakan bahwa semakin tingginya jumlah penduduk yang diiringi dengan pendidikan maka produktivitas tenaga kerja juga akan meningkat dan dapat mempelancar proses pembangunan daerah yang akan menjadi sarana untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi pada suatu daerah.⁴⁰ Sebagaimana firman Allah SWT pada QS. An-Najm ayat 39:⁴¹

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “Dan bahwasanya tidak ada hak bagi seseorang kecuali hasil usaha yang dikerjakan”.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupannya di muka bumi ini. Sehingga dengan bekerja, masyarakat akan terhindara dari kemiskinan serta dengan bekerja manusia akan memperoleh kehidupan yang lebih baik.

D. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk kepentingan dan kemajuan sosial.

1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah kegiatan pembelanjaan yang dilakukan pemerintah atas barang-barang modal, barang konsumsi dan jasa-jasa.⁴²

⁴⁰ Nurul Huda, *Ekonomi Pembnaguna Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 183

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Hakim*, (Jakarta: Gema Insani, 2016) hlm. 528

⁴² Effendie, *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 31

Sedangkan menurut Guritno menjelaskan pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.⁴³

Dari beberapa pengertian pengeluaran pemerintah maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah kebijakan pemerintah dalam bentuk pembelanjaan terhadap barang-barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu pengeluaran negara dan pengeluaran daerah, yang masing-masing memiliki bentuk pengeluaran yang berbeda-beda.

2. Jenis Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran negara dan pengeluaran daerah, yang masing-masing memiliki bentuk pengeluaran yang berbeda-beda.

Pengeluaran pemerintah daerah ialah seluruh kewajiban daerah yang akan menjadi pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tahun tertentu, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan masing-masing untuk mengatur keuangan daerahnya guna mengembangkan daerahnya. Adapun jenis pengeluaran pemerintah terdiri dari:⁴⁴

169 ⁴³ Guritno Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik edisi ketiga*, (Yogyakarta:BPFE,2018), hlm.

⁴⁴ Oky Dwi Ayanti,dkk., “*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah Daerah, PDRB, dan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*”. Jurnal Institut Teknologi Sepuluh November, (Institut Teknologi Sepuluh November, 2016), hlm. 5

a. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pemeliharaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Anggaran dari pengeluaran rutin ini mempunyai peran penting dalam menunjang berjalannya sistem pemerintahan serta usaha dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas yang akan mendorong tercapainya sasaran dan tujuan dari pembangunan.

b. Pengeluaran Pembangunan atau Belanja Modal

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan umum, baik dalam bentuk pembangunan prasarana fisik maupun non fisik selau disesuaikan dan dialokasikan pada bidang-bidang yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Teori Pengeluaran Pemerintah

Adapun teori-teori perkembangan pengeluaran pemerintah yaitu:⁴⁵

1) Teori Rostow dan Musgreve

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgreve yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi tahap awal,

⁴⁵ Guritno Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik edisi ketiga*, (Yogyakarta:BPFE,2018), hlm. 170-175

tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan swasta yang semakin besar pula banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak. Pada tahap lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial.

2) Teori Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Menurutnya dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{P_kPP_1}{PPK} < \frac{P_kPP_2}{PPK} < \dots < \frac{P_kPP_n}{PPK}$$

P_kPP_1 : Pengeluaran Pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,...n : jangka waktu (tahun)

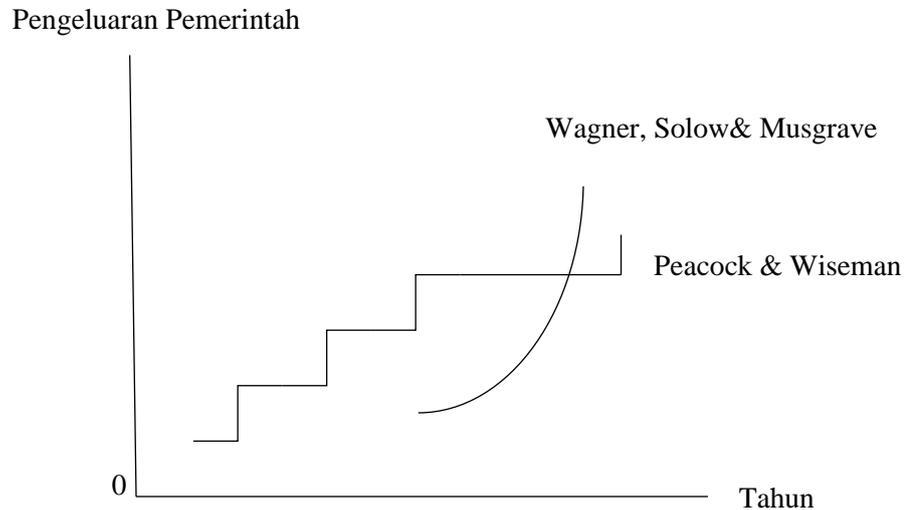
3) Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah semakin besar.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi berbentuk seperti tangga sebagaimana terlihat pada diagram berikut.

Gambar 2.1
Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah



Sumber: Guritno, 2018⁴⁶

Teori Peacock dan Wiseman ini disandarkan pada suatu pandangan yang mengatakan bahwa pemerintah selau berusaha dalam memperbesar pengeluaran, sedangkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang semakin berkurang. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi mengakibatkan besarnya pungutan pajak semakin meningkat meski tarif pajaknya tidak berubah dan tingginya penerimaan pajak juga menyebabkan meningkatnya pengeluaran pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan pemerintah yang besar maka pengeluaran pemerintah juga semakin besar.

⁴⁶ Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik edisi ketiga*, (Yogyakarta:BPFE,2018), hlm. 175

4. Pengeluaran Pemerintah Dalam Perspektif ekonomi Islam

Pada zaman Rasulullah SAW, pemanfaatan zakat digunakan sebagai bentuk pembiayaan publik, dimana dalam zaman ini pengelolaan zakat dan distribusinya dinilai berhasil. Kebijakan pengeluaran dalam ekonomi islam adalah bagian dari kebijakan fiskal, dimana pemerintah membelanjakan pendapatan negara yang didapat. Dengan kebijakan ini negara dapat melakukan distribusi pendapatan pada masyarakat sehingga perekonomian dalam masyarakat akan bergerak.

Menurut Ibnu Taimiyah, pengelolaan pengeluaran berdasarkan prinsip dimana pendapatan pemerintah atau negara merupakan milik dari masyarakat sehingga pendapatan itu harus dibelanjakan kembali demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah SWT tetapkan.⁴⁷ Adapun pengelolaan perolehan pendapatan pemerintah tidak serta merta semua akan dibelanjakan. Setiap pendapatan yang masuk memiliki tata cara penggunaannya masing-masing dalam pembelanjannya sehingga dapat menciptakan prospek positif dalam perekonomian.

Bentuk dari pengeluaran negara yang memberikan dampak lebih bagi kemaslahatan masyarakat pada zaman Rasulullah SAW, yaitu pendidikan dan kebudayaan, pengembangan dari ilmu-ilmu pengetahuan, pembangunan armada perang dan pembangunan keamanan, serta penyediaan pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat. Itulah bentuk-

⁴⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Pembnaguna Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 191

bentuk hasil dari pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan secara umum pada masyarakat sehingga masyarakat terfasilitasi.

Dahulu dalam masa Islam, sumber pokok penerimaan pendapatan adalah didapat dari adanya penerimaan zakat dan sedekah yang dibayarkan oleh masyarakat. Akan tetapi, masuk ke dalam masa Islam modern dengan hanya mengandalkan penerimaan dari zakat dan sedekah saja belum dapat terpenuhi tujuan dari pertumbuhan perekonomian itu sendiri, sehingga dalam masa Islam modern ini pemerintah berhak mencari cara lain agar mendapatkan tambahan penerimaan yang digunakan untuk pembangunan. Dan akhirnya, pemerintah perlu mengenakan pajak baru yang dapat menjadi sumber penerimaan pendapatan yang akan digunakan sebagai pengeluaran negara.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dimana secara sistematis yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

Miragustia Mayza, Raja Masbar, dan Muhammad Nasir (2015) dengan judul "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*"⁴⁸, bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Aceh .

⁴⁸ Miragustia Mayza, Raja Masbar, dan Muhammad Nasir, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh*", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 3, No. 1, (Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Syiah kuala, 2015)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB dan inflasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sedangkan variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Aceh.

Hening Fitria Sarasati El Rani (2015) dengan judul "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Korta Eks-Karesidenan Pekalongan*"⁴⁹, bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Korta Eks-Karesidenan Pekalongan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Makdalena F Asmuruf, Vikie A. Rumate, Goerge M.V Kawung (2015) dengan judul "*Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong*"⁵⁰, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah kota Sorong. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan, sedangkan variabel

⁴⁹ Hening Fitria Sarasati El Rani, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Korta Eks-Karesidenan Pekalongan*", Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 4, No. 3, (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015)

⁵⁰ Makdalena F Asmuruf, Vikie A. Rumate, dan George M.V. Kawung, "*Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong*", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15, No. 05, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, 2015)

jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ryan Perwira, Ridwan, dan Vitayanti Fattah (2018) dengan judul *“Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah”*⁵¹, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB, pengeluaran pembangunan dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan jumlah penduduk mempunyai hubungan negatif dan pengaruhnya tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hijri Juliansyah, Sulkadria (2018) dengan judul *“Pengaruh Total Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue”*⁵², bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh total penduduk dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Simeulue. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel total penduduk tidak berpengaruh, sedangkan variabel PDRB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Afifah Ariyani, Fitri Yetti, dan Noegrahini Lastiningsih (2018) dengan judul *“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan*

⁵¹ Ryan Perwira, Ridwan, dan Vitayanti Fattah, *“Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah”*, Jurnal Katalogis, Vol. 6, No. 2, (Pascasarjana Universitas Tadulako, 2018)

⁵² Hijri Juliansyah dan Sulkadria, *“Pengaruh Total Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue”*, Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Vol. 01, No. 02, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, 2018)

Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”⁵³, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk, dan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Gufon Reynaldin Sunandar (2017) dengan judul “*Pengaruh PDRB Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014*”⁵⁴, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh PDRB, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan pajak investasi terhadap pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah, PDRB, jumlah penduduk, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Muh Ikram Idrus, dan Irma (2017) dengan judul “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar*”⁵⁵, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh PDRB, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan pajak investasi terhadap pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel

⁵³ Afifah Ariyanti dan Fitri Yetti, “*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah*”, Jurnal Wahana Akuntansi, Vol. 13, No. 1, (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2018)

⁵⁴ Gufon Reynaldin Sunandar, “*Pengaruh PDRB Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2014)*”, Jurnal Universitas Islam Indonesia, (Universitas Islam Indonesia, 2017)

⁵⁵ Muh Ikram Idrus dan Irma, “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar*”, Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 13, No. 01, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017)

pengeluaran pemerintah, PDRB, jumlah penduduk, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian
1	Miragustia Mayza, Raja Masbar, dan Muhammad Nasir (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh	Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel independen yaitu jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah dan inflasi.
2	Hening Fitria Sarasati El Rani (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Korta Eks-Karesidenan Pekalongan	Penelitian yang dilakukan oleh Hening Fitria menggunakan model analisis regresi data panel dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel independen yaitu jumlah penduduk, PDRB, dan pengeluaran pemerintah.
3	Makdalena F Asmuruf, Vikie A.	Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan	Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah regresi linear

	Rumate, Goerge M.V Kawung (2015)	Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong	berganda dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel independen yaitu jumlah penduduk dan PDRB.
4	Ryan Perwira, Ridwan, dan Vitayanti Fattah (2018)	Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah	Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Perwira, vitayanti Fattah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel independen yaitu pengeluaran pembangunan dan jumlah Penduduk.
5	Hijiri Juliansyah, Sulkadria (2018)	Pengaruh Total Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue	Penelitian yang dilakukan oleh Hijri Juliansyah dan Sulkadria menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel dependen yaitu total penduduk dan PDRB.
6	Afifah Ariyani, Fitri Yetti, dan Noegrahini	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Pajak Hotel Terhadap	Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Ariyani dkk. menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan variabel

	Lastiningsih (2018)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel independen yaitu PDRB, jumlah penduduk, dan pajak hotel.
7	Gufon Reynaldin Sunandar (2017)	Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014	Penelitian yang dilakukan oleh Gufon Reynaldin menggunakan metode analisis regresi data panel dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel independen yaitu PDRB, pengeluaran pemerintah, dan investasi.
8	Muh Ikram Idrus, Irma (2017)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar	Penelitian yang dilakukan oleh Muh Ikram Idrus dan Irma menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2019

F. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih diuji kebenarannya secara empirik. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah atau peningkatan PDRB merupakan salah satu indikator yang cukup penting dalam menentukan tingkat capaian keberhasilan pembangunan daerah. Dengan kata lain PDRB dapat dikatakan sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Adapun hubungan antara PDRB dengan pendapatan asli daerah merupakan sebuah hubungan secara fungsional. Hal ini dikarenakan PDRB merupakan fungsi dari PAD seperti yang dikatakan oleh Tarigan bahwa PDRB yang meningkat maka akan dapat menambahkan penerimaan pendapatan daerah guna membiayai program-program pembangunan pemerintah daerah yang selanjutnya dapat memicu adanya dorongan terhadap peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya sehingga produktivitas masyarakatnya akan meningkat.

Menurut penelitian terdahulu oleh Hijri Juliansyah dengan judul “Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin”. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan persamaan *double logaritma*. Berdasarkan hasil dari

penelitian dari dua variabel independen yakni PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu PDRB Berpengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian
Hijri Juliansyah (2018)	Pengaruh Total Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simelue	Penelitian yang dilakukan oleh Hijri Juliansyah dan Sulkadria menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel dependen yaitu total penduduk dan PDRB.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktivitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Apabila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima akan meningkat karena adanya jumlah penduduk yang produktif di dalam perekonomian dan juga peranan pajak

sebagai salah satu unsur pada PAD dan dalam pembiayaan yang rendah, sangat bervariasi yang disebabkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian. Jadi apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian yang pada waktu tertentu memberikan dampak langsung terhadap perolehan pendapatan asli daerah, karena adanya sumbangan pajak pendapatan penduduk ke pemerintahan daerah.

Tabel 2.3
Ringkasan Penelitian Terdahulu Jumlah Penduduk Berpengaruh
Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian
Makdalena F Asmuruf, dkk. (2015)	Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong	Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel independen yaitu jumlah penduduk dan PDRB.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila, pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintahan yang bersangkutan.⁵⁶

Optimalisasi penerimaan PAD harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja dan bertambah produktivitas masyarakat akan dan investor di daerah, akan berdampak pada peningkatan PAD.

⁵⁶ Olvi Verdia Abdillah dan Hefriza Hatra, “*Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat*”, Jurnal Benefita, Vol. 4, No. 3, (Fakultas Ekonomi Universitas Andalas,2019), hlm. 39

Tabel 2.4
Ringkasan Penelitian Terdahulu Pengeluaran Pemerintah
Berpengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
Gufron Reynaldin Sunandar (2017)	Pengaruh PDRB Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014	Penelitian yang dilakukan oleh Gufron Reynaldin menggunakan metode analisis regresi data panel dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel independen yaitu PDRB, pengeluaran pemerintah, dan investasi.
Muh Ikram Idrus, dan Irma (2017)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar	Penelitian yang dilakukan oleh Muh Ikram Idrus dan Irma menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4. Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

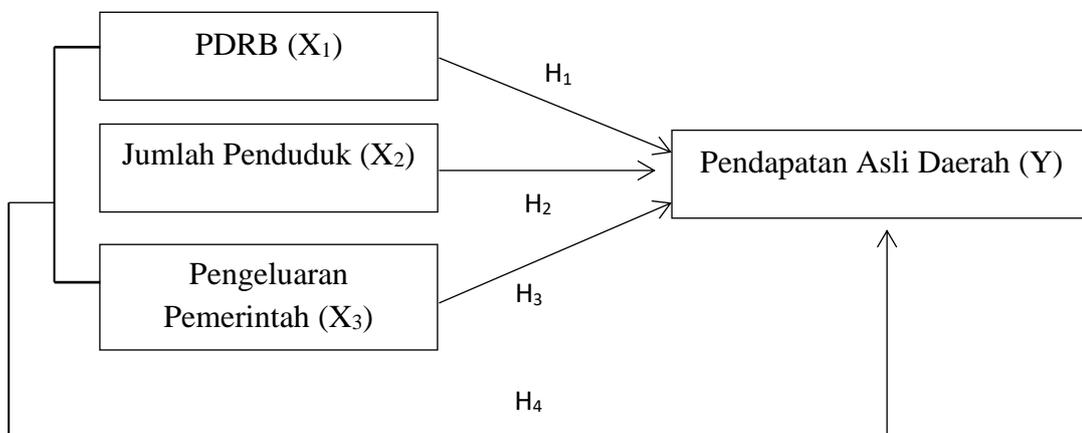
Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu diatas, hasil dari variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan juga pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan. Ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap PAD. Dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual merupakan gambaran dari arah teori dalam memberikan solusi dari permasalahan secara sistematis. Adapun skema dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Sumber: Dikembangkan dalam penelitian ini

H. Hipotesis

Berdasarkan dari paparan diatas maka hipotesis yang akan diujikan dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

- H₁ : Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan.
- H₂ : Diduga jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
- H₃ : Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
- H₄ : Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan.